



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELEN SETIADI  
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
3. NHK : 210765

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.147.160.600**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 200.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA  
PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/165 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.325.000.000  
4. Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 817.577.600  
5. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/23 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 404.583.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **1.224.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.000.000  
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW YARIS CROSS S HV TYPE Tahun  
2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000  
3. MOBIL, CHERY TIGGO 9 CSH Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.  
719.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **42.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **1.888.379.247**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

## Sub Total

Rp. 6.302.039.847

## III. HUTANG

Rp. 746.779.850

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.555.259.997

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.